

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Dari Rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab sebelumnya Maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut dengan berdasarkan Pemilihan Gubernur sebagai berikut :

1. Kinerja Bawaslu dalam meningkatkan pengawasan partisipatif terbilang cukup baik dalam melakukan sosialisasi karena Bawaslu memaksimalkan setiap sektor untuk melakukan pendidikan dari menggunakan Media sosial dan media massa. Penggunaan cara ini terbilang efektif dalam masa pandemi seperti ini, untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak. Upaya yang dilakukan Bawaslu dalam memberikan pendidikan politik dengan meluncurkan Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif dan para alumni tersebut di berikan mandat untuk menyebarkan informasi. Program yang diluncurkan Bawaslu ini mendapatkan respon yang baik, ini dikarenakan jumlah peserta yang mengikuti program ini sudah banyak.
2. Masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif dapat dimulai dari lingkungan sekitar mereka, mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya pemilihan merupakan bagian dari kita berpartisipasi untuk mensukseskan setiap pemilihan, di masa pandemi kita dapat melakukan

pengawasan partisipatif melalui media sosial tanpa harus bertemu secara langsung kemajuan teknologi memudahkan masyarakat melakukan pengawasan partisipatif apalagi di masa pandemi seperti ini. Tidak ada alasan untuk tidak melakukan pengawasan partisipatif demi terwujudnya pemilihan yang baik.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan sebelumnya maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Idealnya antara Bawaslu dengan penegak hukum harus sejalan dalam menegakkan keadilan demi tercapinya pemilu yang LUBERJURDIL. Bawaslu harus lebih sigap lagi mengantisipasi paslon dan sebagainya dalam kampanye yang tidak akbar, artinya yang melakukan kampanye ke dalam desa-desa atau RT-RT setempat yang kurang pengawasan. Karena terkadang paslon itu melakukan kampanye pribadi diluar yang telah dijadwalkan Bawaslu.
2. Bawaslu harus lebih aktif dalam mengedukasi paslon untuk serta mengedukasi masyarakat untuk ikut aktif mengawasi tahapan pemilu serta melaporkan segala kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan pemilu. Karena dua faktor inilah yang menyebabkan pelanggaran selalu terjadi dan

pengawasan diabaikan. Bawaslu dalam hal ini harus lebih menekankan kepada paslon untuk tidak melakukan pelanggaran dalam persaingan pada pemilihan dan masyarakat harus mencegah pelanggaran yang terjadi bukan ikut dalam pelanggaran itu.

3. Dalam aspek sumber daya manusia akan lebih baiknya sosialisasi yang dilakukan oleh Bawaslu melakukan Program *Go To Campus* dan meningkatkan pengawasan pada sektor kaum perempuan. Melakukan Sosialisasi secara aktif tidak hanya pada saat akan datang pemilihan. Dikarenakan perlu adanya pendidikan politik dan sosialisasi yang berkesinambungan dalam meningkatkan pengawasan partisipatif.
4. Membuat aturan yang konsisten dan dapat dipahami oleh banyak pihak agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kegiatan Bimtek dan Rakernis perlu ditambah volumenya di jajaran pengawas agar pemahaman peraturan perundang-undangan dan teknis kerja pengawasan dapat lebih meningkat lagi. Karena masih ditemukan kelemahan di internal pengawas di level bawah yang kurang memahami peraturan perundangundangan, terutama terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.